



**Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam  
Menangani Kasus *Sex Trafficking* di Filipina Pada Tahun 2006-2014**

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata I**

**Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Dwi Iswahyudi**

**NIM : 14010412120008**

**Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2016**

## **PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Sex Trafficking di Filipina Pada Tahun 2006-2014**

Nama Penyusun : Dwi Iswahyudi

Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Semarang, 26 September 2016

Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Sunarto, M.Si

NIP 19660727 199203 1001

Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si

NIP 19610510 198902 1002

**Dosen Pembimbing :**

1. Drs. Tri Cahya Utama, M.A. (.....)

2. Ika Riswanti Putranti, S.H.,M.H.,Ph.D (.....)

**Dosen Pengaji :**

1. Shary Charlotte HP, S.I.P.M.A (.....)

2. Drs. Tri Cahya Utama, M.A. (.....)

3. Ika Riswanti Putranti, S.H.,M.H.,Ph.D (.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Iswahyudi

NIM : 14010412120008

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi: Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul

**Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam  
Menangani Kasus Sex Trafficking di Filipina Pada Tahun 2006-2014**

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bila mana diperlukan.

Semarang, 28 September 2016

Pembuat Pernyataan,

Dwi Iswahyudi  
NIM 14010412120008

## **MOTTO**

*“There is always need an action after wish”*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini kupersembahkan untuk seluruh Mahasiswa  
yang sedang berjuang untuk mencapai mimpiya*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbilalamin*, syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, kekuatan, karunia, serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Sex Trafficking di Filipina Pada Tahun 2006-2014”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis. Maka penulis mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Gino dan Ibu Wuryaningsih yang terus memberi nasihat, dukungan, dan doa setiap saat untuk kelancaraan anaknya. Serta Kakak Gani Pratama dan Adik Fitri Rostiani yang selalu mendampingi penulis. Terimakasih banyak.
2. Bapak Drs. Tri Cahyo Utomo, M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, juga selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran perkuliahan dan sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan.
3. Mbak Ika Riswanti Putranti, SH, MH, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis sejak awal penulisan.

4. Mbak Shary Charlotte, SIP, MA selaku Dosen Pengaji yang dengan baik hati memberikan kemudahan, kelancaran serta gagasan baru bagi skripsi ini. Serta seluruh staf pengajar Hubungan Internasional Universitas Diponegoro.
5. Bapak Andi Taletting Langi, S.IP, SH, M.Si, M.Phil selaku penyelia kegiatan magang sekaligus kepala subdit KLN di instansi Kemenkumham yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga akhir kegiatan magang I berlangsung.
6. Bapak Arisman selaku Executive Director Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) yang telah memberikan kesempatan dan peluang penulis untuk melakukan kegiatan magang II.
7. Ibu Sulistyowati, SH selaku Penyelia instasi Polda Jawa Tengah yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan kegiatan magang III.
8. Sahabat manis dan manja Fanny, Ayu, Gesta, Andini, Reni, Abi, Yang, Fahrizal, Yudis, dan Silvi. Terimakasih atas kesan dan pengalaman baik buruk selama ini.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hubungan Internasional khususnya angkatan 2012 yang telah memberikan warna dalam proses perkuliahan ini.
10. Teman-teman KKN Desa Ngadisepi, Temanggung yang telah menjadi bagian dari pengalaman menarik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi setiap pembaca.

Semarang, 2016

Penulis

**KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN  
MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING DI  
FILIPINA PADA TAHUN 2006-2014**

**ABSTRAK**

Filipina telah menjadi negara sumber, transit, dan tujuan dari segala bentuk kejahatan perdagangan manusia terutama untuk tujuan eksloitasi seksual atau dikenal dengan *sex trafficking*. Dalam penanganannya, Filipina bekerjasama dengan Indonesia dan Malaysia dimana keduanya memiliki perbatasan langsung dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil kerjasama Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam menangani kasus *sex trafficking* pada tahun 2006-2014. Dalam menganalisis kerjasama tersebut penelitian ini menggunakan teori neoliberal institusionalisme dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis yaitu melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang cukup besar dalam proses penanganan permasalahan perdagangan manusia di Filipina. Adanya kerjasama diantara ketiga negara telah meningkatkan kewaspadaan kemanan di wilayah perbatasan negara serta memunculkan adanya peran masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah dalam membantu memaksimalkan usaha tersebut. Melalui *Trafficking In Person report*, Filipina menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menempati peringkat tertinggi dalam memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia.

**Kata kunci :** Filipina, Indonesia, Malaysia, Kerjasama, *Sex Traffciking*

**THE COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
PHILIPPINES, INDONESIA AND MALAYSIA IN HANDLING SEX  
TRAFFICKING CASES IN PHILIPPINES IN THE YEAR 2006-2014**

**ABSTRACT**

The Philippines has become a source, transit, and destination of all forms of human trafficking, especially for sexual exploitation or known as sex trafficking. In handling the cases, Philippines is cooperated with Indonesia and Malaysia where both of them have a direct border with the Philippines. This study aimed to analyze the shape and result of cooperation between Philippines, Indonesia, and Malaysia in handling sex trafficking cases in the year 2006-2014. In analyzing the cooperation, this study using the theory of neoliberal institutionalism and also using qualitative method with descriptive type-analytical techniques is through interviews, and literature. In this study it can be seen that the cooperation conducted by Philippines with Indonesia and Malaysia have a considerable impact in the process of handling of trafficking problem in the Philippines. The cooperation among the three countries had increased vigilance of security in the border region and the country gave rise to the role of civil society and non-governmental organizations in helping to maximize the business. Through the Trafficking In Persons Report, the Philippines became the only country in Southeast Asia that has the highest ranked in meeting the minimum standards for the elimination of trafficking.

**Keywords :** Philippines, Indonesia, Malaysia, Sex Trafficking

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Praktis .....	9
1.4.2. Manfaat Sosial .....	10
1.5. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5.1. Teori Neo-Liberal Institusionalisme.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Definisi Konseptual .....	15
1.6.1.1. <i>Transnasional Crime</i> .....	16
1.6.1.2. <i>Sex Trafficking</i> .....	16
1.6.1.3. Penanganan Kasus <i>Sex Trafficking</i> .....	16

1.6.2. Operasionalisasi Konsep.....	17
1.6.2.1. <i>Transnasional Crime</i> .....	17
1.6.2.2. Penanganan Kasus <i>Sex Trafficking</i> .....	18
1.6.3. Tipe Penelitian.....	19
1.6.4. Jangkauan Penelitian .....	19
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.6.6. Teknik Analisis Data .....	22
1.7. Sistematika Penulisan .....	27

## **BAB II KONDISI SEX TRAFFICKING DI FILIPINA TAHUN 2006-2014. 29**

2.1. Kerentanan Wilayah Filipina Terhadap Perdagangan Manusia.....	29
2.2. Faktor Domestik Filipina Terhadap Kelangusngan Perdagangan Manusia ....	34
2.2.1. Ekonomi .....	34
2.2.2. Sosial dan Politik .....	36
2.3. <i>Plan of Action</i> Filipina Terhadap Kasus Perdagangan Manusia .....	40
2.4. Kejahatan <i>Sex Trafficking</i> Filipina-Malaysia.....	46
2.5. Kejahatan <i>Sex Trafficking</i> Filipina-Indonesia.....	52

## **BAB III DAMPAK KERJASAMA FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP KEJAHATAN SEX TRAFFICKING DI FILIPINA**

.....	57
3.1 Keseriusan Filipina Terhadap Kasus Perdagangan Manusia .....	57
3.2 Filipina Dibawah Kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III.....	60
3.3 Bentuk Kerjasama Filipina, Indonesia dan Malaysia Terhadap Kasus <i>Sex Trafficking</i> .....	64
3.3.1 Pencegahan .....	64
3.3.2 Perlindungan.....	65
3.3.3 Penuntutan .....	77
3.4 Perjanjian Internasional Sebagai Institusi Internasional .....	79
3.5 Dampak Institusi Internasional Terhadap <i>Sex Trafficking</i> di Filipina .....	82
3.5.1 Visayan Forum .....	85

3.5.2 International Justice Mission .....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1. Kesimpulan .....	89
4.2. Saran.....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Transkrip Wawancara

Dokumen undang-undang negara Republik Filipina No. 9208

Dokumen Perjanjian Patroli Perbatasan Antara Filipina dan Indonesia

Dokumen Perjanjian Kerjasama Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Lokasi Filipina Sebagai Negara Sumber, Transit, dan Tujuan .....	31
Gambar 2.2 Pengalihan Sekolah untuk Kegiatan Militer Tahun 2013 .....	37
Gambar 2.3 Tingkat Perdagangan Manusia Berdasarkan Jumlah Anak-anak yang Keluar dari Sekolah .....	39
Gambar 2.4 Arus Migrasi ke Sabah .....	46
Gambar 3.1 Salam Komando dari Perwakilan Filipina dan Indonesia di Atas Kapal Perang BPR Miquel Malvar PS-19 .....	74

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Porsentase Pengangguran di Filipina 2005-2014.....	35
Tabel 3.1	Daftar Implementasi Instrumen Internasional di Filipina .....	58
Tabel 3.2	Jumlah Kasus <i>Sex Trafficking</i> dan Penetapan Hukuman Pelaku Kejahatan di Filipina Era Presiden Gloria Macapagal Arroyo .....	61
Tabel 3.3	Jumlah Kasus <i>Sex Trafficking</i> dan Penetapan Hukuman Pelaku Kejahatan di Filipina Era Presiden Benigno Aquino III.....	62

## **DAFTAR SINGKATAN**

AFP	: <i>Armed Forced Philippine</i>
BCA	: <i>Border Crossing Agreement</i>
BCCC	: <i>Border Commitee Chairmen's Conference</i>
BCS	: <i>Border Crossing Stations</i>
BI	: <i>Bureau of Immigration</i>
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
CORPAT	: <i>Coordinated Patrol</i>
DFA	: <i>Department of Foreign Affairs</i>
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
DOLE	: <i>Department of Labour and Employment</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>
IACAT	: <i>Inter-Agency Council Agaist Trafficking</i>
ICCPR	: <i>International Covenant of Civil and Political Right</i>
IGO	: <i>International Government Organization</i>
IJM	: <i>International Justice Mission</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
MILF	: <i>Moro Islamic Liberation Front</i>
MMEA	: <i>Malaysian Maritime Enforcement Agency</i>
MNLF	: <i>Moro National Liberation Front</i>
MTA	: <i>Maritime Training Activity</i>
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>

PATD	: <i>Philippines Anti Trafficking Database</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCTC	: <i>Philippine Center on Transnational Crime</i>
PHILINDO	: <i>Philippines Indonesia</i>
PHIMAL	: <i>Philippines Malaysia</i>
PSA	: <i>Philippine Statistic Authority</i>
RA	: <i>Republic Act</i>
TIAMLEW	: <i>Trilateral Interagency Maritime Law Enforcement Workshop</i>
TIP	: <i>Trafficking In Person</i>
TVPA	: <i>Trafficking Victim Protection Act</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration on Human Right</i>
UNAFEI	: <i>United Nation Asia and Far East Institute</i>
UNHCR	: <i>United Nation High Commissioner for Refugees</i>
UNIAP	: <i>United Nation Inter-Agency Project</i>
UNICEF	: <i>United Nation Children's Fund</i>
UNICRI	: <i>United Nation Interregional Crime and Justice Research Institute</i>
UNODC	: <i>United Nation Office on Drugs and Crime</i>
UNSCAP	: <i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific</i>
UNTP	: <i>United Nation Trafficking Protocol</i>
VF	: <i>Visayan Forum</i>